



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
 NOMOR 244 TAHUN 1993
 TENTANG : MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 KOTA BOLA

I. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

No	KAB / KOTA	No	NAMA MADRASAH
1	NIAS	1	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BOLO- PEDOROTUHO
2	TAPANULI SELATAN	1	MIN HAGASARIEU PADANG BOLAK
		2	MIN PARINGGOMAN BARUMUN
		3	MIN SIRIHUAN
		4	MIN SIHABORGOAN DALAN
		5	MIN SIMPANG GAMBIR NATAL ✓
		6	MIN PADANG GARUGUR
		7	MIN SIPUNUKAN NATAL ✓
3	TAPANULI TENGAH	1	MIN PAHEHE SORKAN
		2	MIN PIMAG SORI
4	TAPANULI UTARA	1	MIN SIRIHIT-RIHIT
5	ASAHAN	1	MIN MUTIARA KISARAN
		2	MIN PULAU RASYAT TUA
		3	MIN RAWANG LAMA BERANGIR
6	LAEHAN BATU	1	MIN BANGUN SARI NEGERI LAMA B.HILIR
		2	MIN KOTA PINANG
		3	MIN BABESALAN GAYA BARU MERBAU
7	LANGKAT	1	MIN SECURAI BABALAN
		2	MIN GEBANG
		3	MIN MARLINTUNG KEPALA SUNGAI
		4	MIN BUKIT KUBU BESITANG
		5	MIN SELIPIT DESA MANGGA
8	SIMALUNGUN	1	MIN KARANG SARI ✓
9	MEDAN	1	MIN SUNGGAL
10	SIBOLGA	1	MIN KETAPANG SIBOLGA KIRI
		2	MIN AEK HABIL
11	TEHING TINGGI	1	MIN PERSIAHAN PADANG HULU
		2	MIN BROHOL RAMINTAN
J U M L A H		: 28 UNIT	

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Tarmizi Taher
Dr. H. TARMIZI TAHER